

BAB 5

PUSAKA BUDAYA DAN PEMULIHAN KOMUNITAS DI ACEH PASCA- TSUNAMI

Patrick Daly
Yenny Rahmayati

Pengalaman kami di Aceh membuat kami percaya bahwa agenda rekonstruksi dan pembangunan yang luar-biasa jumlahnya telah gagal menyentuh dimensi kultural dan historis pemulihan sosial. Walaupun didukung dengan banyak rapat, pertemuan-pertemuan koordinasi dan pernyataan-pernyataan publik mengenai kerjasama inter-agensi, mustahil rasanya ditemukan definisi yang bisa disepakati bersama tentang apa perlunya dan seperti apa mestinya ‘pemulihan’ itu. Sulit dibayangkan sumber daya yang sedemikian besarnya bisa dialokasikan dan dibelanjakan¹ tanpa babak akhir yang jelas, namun sayangnya inilah permasalahan endemis yang banyak terjadi dalam situasi pascabencana² (Bennett et al. 2006; Telford dan Cosgrave 2006). Bukti dari Aceh memberikan acuan bahwa hal ini menjadi masalah khususnya ketika ada

¹ Perkiraan-perkiraan menyebut total pembelanjaan pascatsunami sebesar lebih dari 12 milyar dolar AS, sementara ‘Master Plan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Wilayah dan Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias, Sumatra Utara’, panduan utama dan resmi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah Indonesia, menyebut permintaan dana untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh kementerian/lembaga sampai tahun 2009 sebesar Rp. 58,3 trilyun. Dananya berasal dari 1) Pemerintah Indonesia yang menjanjikan Rp. 5,9 trilyun (termasuk moratorium Rp. 3,9 trilyun dari Paris Club, tapi terpisah dari dana yang berasal dari departemen dan lembaga di Provinsi NAD dan Nias dalam bentuk dana desentralisasi, tugas asistensi, dan dana lembaga pusat, sektor peradilan dan sektor finansial), dan 2) hibah asing Rp. 15,7 trilyun dari sumber bilateral dan Rp. 7,7 trilyun dari sumber multilateral. Ada pula hibah US\$ 300 juta dari Bank Pembangunan Asia. Perkiraan dana total yang dijanjikan oleh sektor swasta dan pemerintah sebesar Rp. 13,5 trilyun. Laporan sintesis *Joint Evaluation of International Response to the Indian Ocean Tsunami* menyebut total aliran dana internasional sebesar US\$ 13,503 juta (Telford & Cosgrave 2006, h. 81).

² Ini dapat dilihat dengan sangat jelas dalam perdebatan panas yang menghambat rekonstruksi situs World Trade Center menyusul serangan 11 September 2001 (Vale & Campanella 2005). Kasus ini menegaskan silang-sengkarut suara yang bersaing dan sering bentrok berebut menyusun rekonstruksi pascabencana.

keterlibatan sejumlah besar organisasi eksternal dalam proses bantuan dan rekonstruksi.

Buku Naomi Klein yang terkenal, *The Shock Doctrine*, memberi perhatian pada perilaku sinis dan oportunistis yang sering menyertai proses rekonstruksi pascakonflik dan pascabencana. Dalam bukunya, Klein membangun argumen yang sangat kuaah bahwa kepentingan pemerintah dan korporat mengeksploitasi keadaan yang menyusul trauma sosial berskala besar demi menanggung keuntungan politik dan/atau ekonomi, dan dalam sejumlah kasus, hal ini memicu atau mendorong terjadinya trauma (Klein 2007). Walaupun terlihat jelas ada kasus-kasus di mana bantuan untuk pembangunan dan pertolongan darurat dimanipulasi demi meraih tujuan-tujuan politik, ekonomi atau sosial, dalam bab ini kami ingin menyampaikan bahwa praktik-praktik dengan sasaran perubahan sosial yang berada di luar konteks-konteks sosial dan budaya yang sudah ada dapat mengganggu proses pemulihan komunitas-komunitas yang mengalami trauma, bahkan ketika pemulihan itu dilakukan lewat campurtangan individu-individu dan organisasi-organisasi yang beritikad baik. Penelitian kami berfokus pada mekanisme-mekanisme kultural dan sosial untuk pemulihan komunitas, dan bagaimana mekanisme-mekanisme ini berhubungan dengan dunia nyata. Kami berpendapat bahwa ada aspek-aspek pemulihan pascabencana yang ditentukan oleh pulihnya hubungan dengan praktik-praktik kultural dan sosial yang telah dikenal akrab, yang pada gilirannya terkait erat dengan lingkungan lama. Upaya-upaya bantuan dan rekonstruksi yang semakin menjauhkan orang dari konteks-konteks fisik dan sosial yang telah mereka kenal akrab berisiko menarik mereka dari infrastruktur komunitas dasar yang diperlukan untuk pemulihan. Kami membuktikan bahwa di Aceh, proses penyambungan kembali komunitas dengan lingkungan lamanya yang sangat penting ini telah diacuhkan oleh organisasi-organisasi internasional dan nasional yang sebagian besar kurang mengetahui atau tidak mengindahkan praktik-praktik kultural dan sosial setempat. Hal ini didukung oleh bukti dari survei-survei lapangan yang dilakukan di Aceh, dan diperkuat oleh berbagai sumber kepustakaan dari ilmu-ilmu sosial.

Dari ‘membangun kembali dengan lebih baik’ hingga menghubungkan kembali dengan budaya masa lalu

Kita akan membangun kembali Aceh dan Nias, dan kita akan membangunnya kembali dengan lebih baik...

—Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia (2005)

Sebuah pernyataan filosofi dan slogan populer yang dipromosikan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi untuk Aceh dan Nias (BRR), organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi upaya-upaya bantuan di wilayah yang rusak dilanda Tsunami, adalah ‘Membangun Kembali dengan Lebih Baik’. Frase ini lazim digunakan dalam kepustakaan pemerintah dan LSM yang berkenaan dengan rekonstruksi pasca tsunami, dan, dengan sedikit pengecualian, belum dibantah. Sekilas, sulit untuk tidak sepakat dengan istilah ‘membangun kembali dengan *lebih baik*’, karena jelas niatnya baik. Namun, kami merasa bahwa di tengah dorongan untuk membangun kembali dengan lebih baik, sejumlah faktor yang vital untuk mencapai pemulihan komunitas jangka panjang menjadi terlewatkan. Dalam tulisan ini, kami tidak ingin berkuat untuk mengevaluasi mampu tidaknya agensi-agensi ‘membangun kembali dengan lebih baik’ berdasarkan kasus per kasus secara harfiah, melainkan membantah secara kritis manfaat penerapan konsep tersebut dalam situasi Aceh pasca tsunami.³ Hal ini memungkinkan kita untuk membahas dengan lebih bermanfaat bagaimana hubungan pelik antara perubahan dan pemulihan di lingkungan pasca bencana, dan pentingnya praktik-praktik budaya serta narasi-narasi historis di dalamnya.

Sulit dipungkiri, menyusul dekade-dekade konflik, isolasi, dan kesulitan ekonomi, Aceh telah dililit persoalan-persoalan berat ketika terjadi Tsunami (Reid 2006). Aceh telah sekian lama melawan berbagai gelombang penjajahan bangsa Eropa, yang sering melibatkan pertempuran luas, dan masa-masa pendudukan oleh Portugis yang diteruskan oleh Belanda. Pergulatan ini berlanjut sesudah kemerdekaan Indonesia ketika golongan-golongan di Aceh, terutama sekali *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM), melancarkan kampanye separatis ringan menentang pemerintah pusat Jakarta. Aceh berada dalam status darurat militer pada saat kejadian Tsunami, dan permusuhan belum berakhir secara resmi hingga akhirnya terjadi penandatanganan Kesepakatan damai Helsinki pada bulan Agustus 2005, yang secara efektif mengakhiri keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan kemerdekaan utuh, perjanjian yang membawa Aceh kepada masa stabil dan damai.

³ Di titik ini, penting disampaikan pernyataan dukungan yang tegas terhadap mayoritas sangat banyak individu dan organisasi (lokal maupun internasional) yang berbakat dan beritikad baik, yang bekerja ekstra keras memperbaiki situasi di Aceh dan wilayah lain yang terkena tsunami. Dalam banyak cara, banyak temuan kami menyuarakan keluhan dan frustrasi yang dialami dan diungkapkan oleh banyak pekerja bantuan yang telah mencurahkan begitu banyak waktu dan tenaga pada proses rekonstruksi.

Namun demikian, berbagai persoalan yang dihadapi tidak membuat Aceh kehilangan anugerah kekayaan praktik sosial dan budaya, serta kesadaran historis yang panjang dan membanggakan, yang kesemuanya, pada hemat kami, merupakan unsur-unsur kunci dalam proses pemulihan komunitas. Kami memandang slogan ‘membangun kembali dengan lebih baik’ bukan saja sebagai pernyataan negatif tentang Aceh beserta lembaga-lembaga sosial budayanya jauh sebelum Tsunami, tapi juga bagian dari pembenaran yang diterima secara global terhadap pemberlakuan agenda rekonstruksi dari-atas-ke-bawah yang dipaksakan dari luar. Seruan perubahan yang eksplisit pada instruksi tersebut bukan berasal dari dalam Aceh, dan telah diterjemahkan secara luas di lapangan termasuk mencakup rekonstruksi fisik bangunan dan komunitas, serta program-program yang berfokus pada perubahan sosial untuk menciptakan kondisi-kondisi kehidupan dan kesempatan-kesempatan sosial yang ‘lebih baik’ di Aceh. Ini berlangsung di luar segala perbincangan di lingkup komunitas LSM perihal peran mereka dalam prosesnya dan kebutuhan untuk mengupayakan rekonstruksi ‘partisipatoris’ yang peka secara lokal. Telah nyaris menjadi asumsi di dalam industri rekonstruksi bahwa ‘jendela kesempatan’ yang disodorkan oleh bencana harus ditangkap untuk dimasukkan ke dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara luas, sebagaimana terlihat jelas dalam popularisasi LRRD – Keterkaitan antara Pertolongan Darurat, Rekonstruksi dan Pembangunan (Christoplos 2006).

Pengalaman kami di Aceh dan berbagai situasi traumatis lainnya, disertai kajian luas studi kepustakaan dari sejumlah disiplin yang berkenaan dengan pemulihan pascabencana, mendorong kami untuk menentang gagasan ‘membangun kembali dengan lebih baik’ dengan paham ‘memulihkan hubungan dengan masa silam’ sebagai lensa lain untuk mengonseptualkan pertolongan darurat pasca trauma dan proyek-proyek rekonstruksi. Konsep tandingan ini dilandasi oleh pemahaman kami tentang pemulihan komunitas sebagai usaha terbaik untuk menegakkan kembali lintasan sosial dan momentum yang ada di komunitas sebelum terjadi bencana, hingga ke titik di mana komunitas dapat menangani dampak jangka panjang kehancuran dan trauma di dalam kerangka stabilitas dan perubahan yang didefinisikan secara internal. Kami percaya bahwa kemungkinan besar ketahanan dan keberlanjutan masyarakat akan tercapai lebih jika program-program yang dijalankan tidak melampaui ekspektasi, kapasitas dan sensibilitas kultural mereka yang harus berjuang dan hidup dengan berbagai konsekuensi dari segenap upaya yang dilakukan, bahkan jauh sesudah berakhirnya

sistem penunjang eksternal.

Dalam literatur ilmu sosial dan psikologi yang relevan, diterima secara luas bahwa ada proses laten dalam diri individu dan komunitas yang memungkinkan mereka mengatasi stres dan trauma (Brickman et al. 1982; Omer dan Alon 1994; Rich et al. 1995; Norris dan Kaniasty 1996; Oliver-Smith 1996; Gilbert dan Silvera 1996; Gist dan Lubin 1999; Bonanno 2004; dll.). Tinjauan pustaka ini menyarankan bahwa masyarakat dan komunitas lazimnya dianugerahi daya pulih yang membuat mereka mampu merespon dan pulih dari trauma (Bonanno 2004; Bonanno dan Keltner 1997; Cardena et al., 1994), dan bahwa pertolongan dari luar harus sangat berhati-hati menginterupsi atau mengooptasi mekanisme respon asli (Gilbert dan Silvera, 1996; Oliver-Smith 1996).⁴ Selain itu, telah banyak dibuktikan bahwa usaha mengatasi penderitaan adalah proses yang ditentukan secara kultural, dan berlangsung secara beragam dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda (Rich et al., 1995; Oliver-Smith 1996; Gist dan Lubin 1999). Tiap-tiap masyarakat memiliki tata cara budaya khas yang berbeda dalam mengelola trauma, dan cara-cara ini perlu dikenali pada tahap awal upaya bantuan dan rekonstruksi pascabencana. Memperluas hasil yang diperoleh dari studi kepustakaan, kami berpendapat bahwa proses pemulihan juga ditentukan secara historis dan materil, karena hal itu merupakan bagian dari lintasan kultural dan sosial yang lebih luas, dan dilaksanakan di lingkungan yang telah terbentuk secara bermakna dan berpadu dengan pembuatan proses tersebut. Inilah poin penting yang akan kami paparkan selanjutnya di bawah.

Dari sudut pandang pusaka budaya, kami sangat bersimpati kepada isu keberlanjutan, dan kami berpendapat bahwa salah satu aspek terpenting dari pemulihan pada periode paling awal pasca bencana adalah penegakan kembali kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sebelumnya. Pendapat yang didasarkan akal-sehat ini didukung oleh 'prinsip keberlanjutan' Omer yang 'menetapkan bahwa di seluruh tahapan bencana, pengelolaan dan penanganan harus bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan keberlanjutan fungsional, historis dan interpersonal di tingkat individu, keluarga, organisasi dan komunitas' (Omer dan Alon 1994, h. 274). Kami sepakat dengan pemikiran dasar ini, dan merasa bahwa merangkul

⁴ Dalam sebuah pembahasan yang memuaskannya tentang destruksi dan rekonstruksi urban, Vale & Campanella membangun kasus kokoh bahwa merupakan perkecualian historis bagi kota-kota yang rusak parah untuk TIDAK pulih, dengan berpijak nyaris eksklusif pada studi-studi kasus yang mendahului internasionalisasi proses pertolongan darurat dan rekonstruksi.

kembali konteks sosial dan budaya yang sebelumnya sudah ada merupakan hal yang sangat mendasar bagi pemulihan komunitas, sebuah argumen yang juga didukung oleh sejumlah penulis lain (Omer dan Alon 1994; de Vries 1995; Gist dan Lubin 1999, etc.).⁵ Dari ini kami memandang bahwa patokan tertinggi kesuksesan upaya pemulihan adalah sebaik apa komunitas mampu terus berlanjut sebagai entitas sosial dan kultural yang kohesif sesudah selesainya rekonstruksi. Mengingat besarnya skala upaya bantuan darurat dan rekonstruksi dalam banyak situasi pasca bencana serta meningkatnya keterlibatan internasional, membuat pertanyaan ini menjadi semakin lebih penting lagi.

Lanskap-lanskap vernakular, praktik-praktik sosial dan pemulihan

Ruang eksistensial merupakan konstanta dari produksi dan reproduksi melalui pergerakan-pergerakan dan aktivitas-aktivitas para anggota sebuah kelompok. Ia bukan berupa ruang pasif, melainkan ruang bergerak yang mewardahi pengalaman. Ia dialami dan diciptakan melalui aktivitas-kehidupan, sebuah ruang sakral, simbolik dan mistis yang sarat dengan makna sosial yang menyelubungi bangunan-bangunan, objek-objek dan fitur-fitur topografi lokal, yang menyediakan titik-titik acuan dan bidang-bidang orientasi

⁵ Ada aneka literatur yang berfokus pada bagaimana bencana dan respons pascabencana mengekspose atau bahkan memperkuat ketidaksetaraan sosial yang sebelumnya sudah ada (lihat ringkasannya dalam Gist dan Lubin 1999, h. 49). Dalam tahun-tahun belakangan, hal ini telah menjadi isu besar bagi pendonor dan agensi bantuan yang memang perlu berhati-hati agar tidak melayani kepentingan struktur-struktur yang semakin merugikan segmen-segmen masyarakat berdasarkan alasan gender, kelas, usia, ras, afiliasi politik dsb. Meski mungkin patut dipuji pada satu tingkatan, hal ini dipakai membenarkan program yang sengaja dilangsungkan di luar konteks yang dipahami secara kultural. Ini mencuatkan pertanyaan kritis tentang melewatkan penilaian moral di tengah tiadanya otoritas moral yang jelas, dan menentukan tujuan dasar dari proses bantuan kedaruratan dan rekonstruksi. Mengingat bahwa masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan ada di semua masyarakat, aneh dan mungkin munafik jika negara donor membeda-bedakan seperti itu: suatu perkara yang tidak hilang di kebanyakan lokal dalam situasi rekonstruksi dan pembangunan. Lebih penting dari itu, kami percaya bahwa pembuatan keputusan perlu dijaga ketat agar tidak keluar dari bingkai membantu pemulihan di komunitas-komunitas yang trauma, dan memrakarsai transformasi sosial sebagai bagian dari intervensi bantuan harus menjadi perkecualian dan bukan keharusan bagi organisasi-organisasi eksternal. Kami cenderung sepakat dengan pernyataan Vale dan Campanella bahwa “pemulihan harus pula berbuntut semacam kembali ke kenormalan relasi sosial dan ekonomi menurut manusianya, bahkan kalau pun apa yang disebut kenormalan itu hanya meniru dan memperpanjang ketidakadilan masa lalu pra-bencana” (Vale & Campanella 2005), dan menerima konsekuensi dari ketidakadilan lama yang tidak kunjung hilang. Kami tetap tidak bisa yakin dengan angka keberhasilan jangka panjang program yang berkeras mencampuri realitas sosial yang ada. Selain itu, kepustakaan mendukung bahwa bencana dapat membuka kesempatan bagi masuknya kelompok-kelompok baru ke dalam struktur-struktur kekuasaan komunitas yang dihasilkan oleh dinamika lokal (Aronoff & Gunter 1992; Bolin & Stanford 1989; Couto 1989; Gibbs 1982; Oliver-Smith 1996; Rich et al. 1995). Jika akan terjadi perubahan nyata, lebih baik penduduk lokal menjadi aktor perubahan itu, menjadi pemilik keberhasilan mereka, dan bertanggungjawab atas kegagalan mereka.

emosional untuk keterikatan dan keterlibatan manusia (Tilley 1994, h. 16).

...kehilangan akses terhadap tempat-tempat yang bermakna kultural dan sosial, dan putusnya hubungan dengan masyarakat luas sebagai akibatnya, menggerus kemampuan komunitas untuk memutar 'roda penyembuhan'-nya (de Vries 1995, p. 379).

Sejauh ini kami telah membuat argumen bahwa proses pemulihan perlu dikonsepsi ke dalam kerangka sosial dan kultural untuk lebih memahami sepenuhnya kompleksitas proses-proses bagaimana sebuah komunitas mengatasi trauma pasca bencana. Kami berpendapat bahwa program-program yang peka terhadap dimensi-dimensi kultural dan sosial dari sebuah proses pemulihan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil dan berkelanjutan. Di bagian pembahasan ini, kami membuat kaitan langsung antara proses-proses sosial-budaya dengan lanskap-lanskap vernakular. Hal ini khususnya menjadi penting karena khazanah besar dari apa yang lazim dirujuk sebagai 'rekonstruksi' secara langsung melibatkan lingkungan binaan, dan dalam kasus Aceh, hal itu dimodifikasikan sebagai bagian dari 'membangun kembali dengan lebih baik'. Ada dua isu besar yang perlu dipertimbangkan ketika menata kembali lingkungan masyarakat sesuai bencana. Pertama, lanskap harus dipahami secara kultural, dibentuk secara bermakna, dan biasanya merupakan hasil dari proses akumulatif jangka panjang. Lanskap adalah tempat-tempat yang berisi makna kultural penting yang membumikan komunitas. Kedua, dunia nyata terintegrasi dengan proses penyelenggaraan sebagian besar praktik-praktik sosial. Masyarakat perlu memiliki latar fisik dan budaya yang sesuai agar dapat melaksanakan praktik-praktik yang mendasar bagi reproduksi sosial dan proses-proses potensial yang relevan bagi rekonstruksi dan pemulihan. Proses membangun kembali secara berbeda dengan yang sebelumnya bukan saja berpotensi membingungkan komunitas yang berupaya memulihkan hubungan-hubungan dengan latar fisik yang telah mereka kenal dengan akrab, karena segala sesuatunya terlihat, terasa dan terkesan asing, tetapi juga karena banyak mekanisme laten penanggulangan dan pemulihan yang perlu dijalankan komunitas pada masa-masa seperti itu bersangkut paut dengan dunia nyata di mana komunitas itu hidup. Bahkan pada lanskap yang paling rusak parah sekalipun, sebuah konsep 'keakraban' terbukti mampu memberikan kerangka yang kokoh untuk proses-proses rekonstruksi komunitas, menyediakan target yang dipahami, patokan keberhasilan yang dapat dicapai serta keyakinan baru.

Karya pakar antropologi budaya, Oliver-Smith, telah secara

bermanfaat menekankan hubungan antara tempat dan pemulihan.

Penelitian terkini menekankan pentingnya tempat dalam pembentukan identitas individu dan komunitas, dalam pengkodean dan kontekstualisasi waktu dan sejarah, dan dalam politik interpersonal, komunitas, dan relasi-relasi antar budaya. Keterikatan pada tempat semacam ini mengandung arti bahwa hilangnya atau pindahnya komunitas dari lokasinya berada dikarenakan bencana bisa menjadi sangat traumatis (Oliver-Smith 1996, h. 308).

Kami berpendapat bahwa setidaknya dalam sejumlah kasus, ‘membangun kembali dengan lebih baik’ merongrong fungsionalitas, daya tahan, dan makna kultural dari lingkungan binaan setempat serta mekanisme sosial tersirat yang penting bagi pemulihan sosial jangka panjang maupun partisipasi komunitas yang menyeluruh dalam upaya-upaya bantuan dan rekonstruksi. Sebagaimana yang kami tunjukkan, banyak ‘aset-aset’ pokok yang rusak karena Tsunami di Aceh dan perlu ‘direkonstruksi’, terkait erat dengan penyelenggaraan praktik-praktik sosial serta memainkan peranan kuat terhadap keterikatan masyarakat pada tempat-tempat, rasa identitas, dan menjadi patokan-patokan untuk suatu persamaan dari kondisi ‘normal’. Merupakan hal yang umum bahwa dalam program-program rekonstruksi dan pembangunan yang didorong dari luar, komponen inti dalam lanskap budaya lokal dipandang secara praktis serta dari kejauhan, dan nilai penting dari fitur-fitur, ruang-ruang dan tempat-tempat untuk pembentukan masyarakat secara lebih mendalam, diabaikan. Hal ini perlu ditinjau kembali. Kini kami beralih pada hasil sejumlah penelitian lapangan untuk mengurai lebih jauh isu-isu tersebut dalam rekonstruksi Aceh pasca Tsunami. Kami menggunakan beberapa contoh untuk menunjukkan keterkaitan antara unsur-unsur lingkungan binaan dan praktik-praktik sosial yang penting untuk pemulihan komunitas.

Survei pusaka budaya dan rekonstruksi

Kami telah berada di Aceh sejak Tsunami, bekerja dalam berbagai kapasitas dengan LSM, akademisi, serta bersama-sama mengkoordinasi survei-survei dengan Komunitas Pusaka Aceh (*Aceh Heritage Community*).⁶ Kami telah mengadakan survei lapangan yang rinci di tingkat-desa selama enam bulan sejak awal 2005 di wilayah yang terkena Tsunami, dengan berfokus pada isu-isu pusaka budaya dan pembentukan kembali masyarakat yang terkena bencana. Kami mengumpulkan data dalam tiga

⁶ *Aceh Heritage Community Foundation*, yang didirikan oleh salah satu penulis bab ini, berkiprah melestarikan pusaka budaya di Aceh dan memupuk kesadaran tentang sejarah Aceh.

survei besar terhadap sekitar 150 situs di Banda Aceh dan sekitarnya yang dipandang penting secara kultural dan/atau historis berdasarkan khazanah 'situs pusaka' yang dibuat oleh Aceh Heritage Community beberapa bulan setelah bencana Tsunami⁷ yang disesuaikan oleh tim kami dengan mencakup spektrum yang lebih luas dari situs-situs non-monumental dan kolonial. Survei-survei ini dilakukan rutin setiap tahun sejak Tsunami antara tahun 2005 sampai 2008, sehingga memungkinkan kami untuk mengamati hubungan antara proses rekonstruksi dan situs-situs pusaka budaya. Kegiatan ini berperan praktis membantu pihak berwenang setempat dan organisasi-organisasi internasional untuk mengelola situs pusaka sebagai bagian dari upaya-upaya rekonstruksi pasca bencana. Data survei ini juga memungkinkan kami untuk menguji hipotesis kami bahwa situs pusaka penting bagi pemulihan komunitas karena berfungsi sebagai pegangan yang jelas dan nyata yang membantu komunitas mengorientasikan diri mereka sendiri.

Dalam penelitian lapangan kami, kami berbicara secara ekstensif dan mendalam dengan penduduk yang mengenal betul geografi setempat untuk menemukan lokasi dari situs-situs yang dimaksud. Melalui banyak diskusi informal, dimana kami sering harus menjelaskan apa yang kami cari dan mengapa, kami mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa yang dipandang oleh penduduk setempat sebagai komponen penting dari lingkungan binaan mereka, suatu temuan yang berada di luar pemahaman kami tentang pusaka budaya yang jauh lebih formal. Penduduk dapat dengan mudah menunjuk situs-situs yang paling berarti bagi mereka, dan seringkali jelas bahwa konteksnya sangat dipengaruhi oleh rekonstruksi. Kami menemukan bahwa ada sejumlah tipe struktur dan tempat yang diidentifikasi penduduk di Aceh sebagai lokasi penting dalam pemahaman-pemahaman lokal akan budaya dan pusaka yang memiliki relevansi tertentu bagi rekonstruksi komunitas.

Untuk mengumpulkan data kualitatif yang lebih sistematis tentang peran yang dimainkan oleh pusaka 'vernakular' ini dalam proses pemulihan komunitas, kami menggelar survei lapangan yang lebih terperinci pada bulan Pebruari 2007, di mana lebih dari 250 responden diwawancarai (lamanya wawancara rata-rata satu jam). Kami mengunjungi 12 desa⁸ di

⁷ Survei untuk pendataan sekitar 150 situs sejarah dan pusaka budaya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya dilakukan oleh Aceh Heritage Community sendiri dimulai sejak tahun 2005 dengan bantuan dana dari Seikatsu Jepang dan Nara Machizukuri Center (sebuah LSM heritage di Jepang) melalui jaringan Lestari Heritage berbasis di Penang-Malaysia.

⁸ Kelimabelas desa tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu: 1. Wilayah Non-tsunami terdiri dari desa Sibreh, Siem dan Siron, 2. Wilayah Relokasi Tsunami yaitu Neuhen, dan 3.

wilayah yang terkena bencana maupun di luar zona kerusakan, kawasan terakhir ini kami pilih untuk menentukan variabel kontrol. Situs-situs yang kami survei terletak dalam radius kurang lebih antara satu jam perjalanan dari Banda Aceh, yang merupakan salah satu kawasan yang mengalami kerusakan paling parah, dan juga menjadi pusat dari kegiatan upaya-upaya pemberian bantuan pasca bencana. Survei dilaksanakan oleh tim-dari Komunitas Pusaka Aceh (*Aceh Heritage Community*) didampingi dua anggota staf Museum Aceh dan kedua penulis. Kami mengadakan sesi pelatihan metodologi untuk semua staf yang terlibat dalam survei, dan kerja lapangan dilakukan di bawah pengawasan intensif oleh kedua penulis yang bersama-sama memimpin proyek ini. Kecuali Daly, semua wawancara merupakan orang lokal Aceh, sebagian besar dari mereka adalah sarjana berlatarbelakang arsitektur yang memiliki minat pada pusaka budaya. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Aceh, tergantung mana yang lebih disukai oleh responden. Semua catatan dari lapangan ditulis dalam bahasa Indonesia, dan semua rekaman wawancara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dianalisis.

Selama wawancara, kami melakukan diskusi mendalam dengan responden mengenai apa yang mereka anggap sebagai komponen-komponen penting dari pusaka vernakular bagi komunitas mereka, dan bagaimana situs semacam itu menjadi penting untuk proses pemulihan dan rekonstruksi. Tujuan utama dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah untuk mengidentifikasi komponen materil yang bermakna secara kultural dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas budaya dan praktik-praktik sosial masyarakat, serta memiliki peran praktis di wilayah yang berhubungan dengan rekonstruksi, seperti misalnya menentukan konteks yang diperlukan untuk membangun dialog yang bermakna antar komunitas.

Survei ini memberikan informasi yang sangat kaya tentang unsur-unsur pusaka budaya vernakular yang dipandang penting oleh warga desa. Walaupun hasil survei ini menunjukkan rentang keragaman lokal, banyak *gampong*⁹ berbagi orientasi serupa dan memiliki kategori-kategori yang sama terhadap unsur-unsur yang memainkan peran-peran yang terdefiniskan dengan jelas. Pembahasan kami tentang hasil

Wilayah terparah terkena Tsunami terdiri dari 11 desa yaitu desa Deyah Glumpang, Kahju, Kampung Jawa, Kampung Pande, Lambadek, Lambaro Neujid, Lamguron, Lampisang, Lampuuk, Peulanggahan and Ulheuleu, Total menjadi 15 desa.

⁹ *Gampong* berarti desa dalam bahasa Aceh, tapi sebagaimana dibahas di bawah, *gampong* merupakan konsep penting yang jauh melampaui definisi umum sebuah desa.

survei dibingkai oleh tiga skala materialitas: desa sebagai sebuah entitas, struktur-struktur yang melayani kebutuhan komunitas yang lebih luas, dan hunian individu keluarga. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan komprehensif terhadap semua unsur pusaka vernakular *gampong-gampong* di Aceh, melainkan untuk memberikan beberapa contoh yang bisa mengilustrasikan poin-poin yang telah diutarakan di atas.

Pembahasan hasil-hasil survei

Data kami sepenuhnya mendukung pendapat bahwa *gampong* bukan sekadar kategori administratif atau entitas fisik murni, melainkan mekanisme sosial yang mapan dan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengakar kuat dalam perpaduan tradisi kultural dan religius. Hal ini telah disebutkan dalam beberapa kajian rekonsruksi di Aceh (Mahdi di volume ini), dan pada umumnya dipahami oleh masyarakat Aceh sendiri dan oleh warga asing yang menghabiskan cukup banyak waktu di Aceh. Keterpaduan *gampong* terungkap dalam banyak wawancara kami, yang menekankan sifat komunal dari praktik-praktik sosial dan tatanan sosial *gampong* yang tertanam cukup dalam. Sangat banyak segi dan aspek kehidupan masyarakat Aceh terbentuk di tingkat *gampong*, dengan hierarki-hierarki baku, kepemimpinan, tata krama berdebat dan diskusi publik, serta proses pengambilan keputusan formal, yang kesemuanya penting bagi terwujudnya praktik-praktik rekonstruksi dan pembangunan yang ‘partisipatoris’. Dalam hampir semua diskusi kami, jawaban responden mengakui kolektivitas ini. Tampak bahwa banyak sarana yang dibutuhkan untuk mengorganisasi dan mengarahkan upaya-upaya rekonstruksi lokal telah mendarah-daging dalam *gampong*, dengan sebagian besar kekurangan berupa sumber daya materil dan finansial.

Menjadi jelas pula bahwa peran vital yang dimainkan *gampong* di dalam identitas Aceh, penstrukturan jaringan sosial, pembuatan keputusan dsb. terwujudkan dalam lanskap vernakular desa di Aceh. Berbagai tanggapan menunjukkan adanya komponen-komponen di dalam tata-tetak *gampong* yang memegang peranan penting bagi terselenggaranya praktik-praktik dan keterlibatan sosial yang luas. Penduduk mengenali dan membicarakan *gampong* sebagai entitas yang jelas dan nyata, atau sebagai sebuah kumpulan entitas. Sebagai contoh, pembicaraan apapun yang menjadi perdebatan komunitas dan pembuatan keputusan lazimnya melibatkan kepala desa (*geuchik*), golongan-golongan tetua desa, dan berlangsung di tempat-tempat khusus, seperti masjid (diuraikan di bawah) dan warung-warung kopi. Fakta menunjukkan bahwa sulit ditemukan

pemisahan yang alami antara unsur-unsur fisik, masyarakat dan proses-proses sangat jelas menunjukkan keterkaitan antara ketiganya. Data kami mendukung bahwa bentuk fisik *gampong* berfungsi untuk memperkuat kekuatan fungsi sosialnya.

Dua contoh terpenting untuk menjelaskan hal di atas adalah masjid dan *meunasab*,¹⁰ keduanya merupakan bagian standar dari kebanyakan *gampong* di Aceh. Sebagian besar responden menunjuk fitur-fitur ini sebagai unsur terpenting ‘pusaka budaya’ di tiap desa, tanpa memandang usia aktual bangunannya. Ketika pertanyaan-pertanyaan klarifikasi diajukan kepada responden, mereka dengan tegas bersikeras bahwa masjid dan *meunasab* adalah *pusaka* Aceh, bahkan sekalipun jika masjid itu baru dibangun dalam masa sepuluh tahun terakhir, dan dalam sejumlah kasus, pembangunannya jelas dilakukan oleh atau dengan sokongan pihak asing.¹¹ Responden menyatakan bahwa masjid dan *meunasab* memainkan peran fundamental pada sejumlah tingkatan yang berbeda, sebagai tempat keagamaan dan ritual peribadatan, dan sebagai ruang diskusi dan interaksi sosial. Kebanyakan responden yang kami ajak bicara mengenai hal ini tidak dapat membayangkan komunitas Aceh tanpa masjid dan *meunasab*, sehingga makin menegaskan pentingnya peran dua komponen ini bagi masyarakat Aceh.

Responden membahas peran dari kedua jenis bangunan ini dalam upaya-upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Ketika berbicara mengenai respons prakarsa-komunitas, responden dengan kompak sepakat mengatakan betapa bangunan-bangunan tersebut tidak ada lagi, dan seharusnya menjadi tempat-tempat yang pertama sekali dipikirkan dalam rekonstruksi, karena di sanalah titik pangkal sebuah komunitas

¹⁰ *Meunasab* adalah kombinasi ruangan ibadah umat muslim dan ruang komunitas. Nilai pentingnya diringkaskan dalam pernyataan berikut: “konsep *meunasab* dalam struktur masyarakat Aceh adalah musala desa. Tetapi, *meunasab* bukan sekadar tempat ibadah. Ia juga memenuhi fungsi komunitas...hampir setiap aspek kehidupan desa di Aceh berpusat di *meunasab*. Segala macam produk budaya tumbuh dari *meunasab*...” (YAKKUM Emergency Unit web site http://www.yeu.or.id/about_us.php). *Meunasab* berperan sangat penting sebagai perantara antara lokal dan pemerintah serta jurisprudensi pada tataran lebih luas. Sebagai contoh, kasus hukum lazim diselesaikan secara agak informal di I, guna menghindari proses yang jauh lebih rumit dan mahal jika perkaranya dibawa ke pengadilan. Ini hanya salah satu peran yang dimainkan *meunasab* dalam meredakan ketegangan sosial (M. Feener, komunikasi pribadi).

¹¹ Bahkan sebelum tsunami, adanya masjid-masjid yang dibangun dengan sokongan dari luar merupakan hal yang lumrah. Khususnya, dana dari negara-negara Teluk Persia banyak disumbangkan untuk mendirikan bangunan religius. Menarik dicatat, ada sejarah panjang pengaruh eksternal pada bangunan masjid di Aceh, termasuk usaha-usaha Ottoman, dan jauh kurang mencolok, Belanda. Tetapi, dari mana pun sumber dana atau cetak-biru arsitekturnya, masjid dipandang sebagai Aceh, seolah-olah mengikuti logika yang agak miring bahwa masjid adalah Muslim, Aceh adalah Muslim, maka masjid adalah Aceh!

berdiri. Lagi pula, ketiadaan tempat-tempat tersebut menyulitkan masyarakat untuk berdiskusi mengenai rekonstruksi dalam lingkungan yang telah mereka kenal akrab, dan menempatkan interaksi dengan pihak-pihak eksternal di luar batasan budaya yang sesuai menurut mereka. Hal ini disebutkan oleh sejumlah responden, khususnya ketika membahas kehidupan di barak-barak pengungsian sementara di mana ‘konsultasi’ komunitas oleh LSM-LSM banyak berlangsung, yang seringkali tidak didukung oleh sejumlah besar infrastruktur fisik dan kultural yang biasanya terdapat dalam sebuah *gampong* di Aceh.

Menariknya, fitur masjid mendapat makna simbolis tambahan penting sehubungan dengan alasan terjadinya bencana tsunami – yang oleh banyak orang Aceh dipandang sebagai azab dari Allah – maupun sumber harapan untuk kelangsungan hidup dan pemulihan – kekuatan iman dan Islam.¹² Sejumlah masjid telah menjadi ikon karena lebih kuat bertahan daripada bangunan-bangunan lain di wilayah yang dilanda Tsunami, dan beberapa di antaranya, seperti masjid di Lampuuk, meraih kemasyhuran internasional.¹³ Ketika kami mewawancarai warga sekitar Lampuuk, para responden pada umumnya menekankan bahwa masjid Lampuuk yang berada di wilayah mereka tersebut selamat manakala bangunan lainnya hancur, mereka memandang ini sebagai kehendak ilahi dan bukan karena ketangguhan struktural bangunannya, dan bahwa masjid ini adalah sumber kekuatan bagi masyarakat yang tersisa untuk mulai menata kembali puing-puing kehidupan dan komunitas mereka. Kisah-kisah perjuangan gigih para korban Tsunami yang nyaris tewas dan akhirnya selamat ketika melihat masjid ini masih berdiri tegak, telah menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. Terlepas dari benar tidaknya penuturan-penuturan tersebut, jelaslah bahwa bertahannya bangunan-bangunan yang tersisa telah menjadi bagian yang tak tergoyahkan dari

¹² Terdapat banyak literatur yang membahas iman dan kesalehan menyusul terjadinya bencana. Ada fenomena umum bahwa orang menganggap bencana alam disebabkan oleh kuasa ilahi, dan komunitas-komunitas mencari pelipur lara di dalam iman (Bushnell 1969; Pargament & Hahn 1986; Ahler & Tamney 1964; Bradfield, Wylie & Echterling 1989; Smith 1978; Gist and Lubin 1999; Oliver-Smith 1996; dll).

¹³ Masjid di Lampuuk menjadi simbol kekuatan Allah di seluruh penjuru dunia muslim berkat foto-foto udara yang mencengangkan yang diambil tak lama sesudah tsunami, yang menunjukkan masjid ini berdiri tegak sendirian di tengah hamparan kehancuran. Selama berbulan-bulan sesudah tsunami, Lampuuk menjadi tujuan yang ramai dikunjungi para utusan, politisi bahkan wisatawan, termasuk mantan presiden AS, Bush dan Clinton. Diskusi informal di tengah berlangsungnya penelitian lapangan kami menyarankan bahwa kehadiran situs-situs semacam ini, dan ‘prestise’ yang dilekatkan padanya, telah mempengaruhi geografi distribusi bantuan, dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi yang, dalam sejumlah kasus, merapat ke lokasi yang memberikan ‘kesempatan berfoto’ lebih baik.

narasi-narasi lokal mengenai keimanan dan kegigihan, dan tampaknya menjadi jangkar-jangkar fisik di mana pemulihan baik fisik maupun sosial ditambatkan. Ini merupakan contoh penting tentang bagaimana masyarakat yang mengandalkan bagian-bagian yang bermakna secara kultural dari lingkungan mereka untuk memperoleh daya apung emosional dan psikologis. Tempat berlindung seperti ini jelas tak mungkin berada di luar pagar suatu latar yang telah dikenal akrab, meskipun dengan kondisi rusak parah, dan mendukung gagasan untuk tidak mengungsikan warga dari tanah mereka terlalu lama.

Pembangunan kembali rumah warga telah menjadi simbol upaya tanggap bencana pasca tsunami di Aceh. Merupakan suatu tindakan yang benar untuk memberikan penekanan akan pentingnya rumah bagi manusia, karena rumah bernilai vital bagi kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan bentuk materil paling intim bagi keterlibatan individu dan keluarga. Tetapi, di seantero Aceh, mayoritas pembangunan (kembali) rumah penduduk dikendalikan oleh LSM dan disaring melalui pengaturan rumit yang dilakukan oleh berbagai perusahaan konstruksi dan subkontraktor. Hal ini telah mengakibatkan penundaan, kekacauan, dan terutama, pembangunan rumah sering menjadi tidak sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat. Selain itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak responden kami, semua fase pembangunan rumah warga sebagian besar dikerjakan oleh kalangan non-lokal.¹⁴

Responden di banyak wilayah dengan cepat bisa menyebutkan permasalahan-permasalahan fisik rumah-rumah bantuan, mulai dari atap yang bocor hingga ketidaan dapur! Sejumlah responden juga menyebutkan bagaimana kehidupan mereka kini berubah karena perubahan fisik yang terjadi terhadap desa dan rumah-rumah mereka.¹⁵

¹⁴ Mengimpor tukang maupun buruh kasar untuk proses rekonstruksi berskala besar merupakan praktik lumrah. Hal ini semakin memastikan terbatasnya masukan maupun keterlibatan lokal. Sebuah kajian menarik tentang pembangunan rumah penduduk menyusul gempa bumi di Gujarat memperagakan bahwa pada sejumlah tingkatan, solusi paling efektif untuk rekonstruksi rumah adalah sekadar menyediakan bahan bangunan dan bantuan keuangan, dan mengizinkan warga setempat mengurus sendiri rancangan dan pembangunan rumah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efisien, efektif di ongkos, dan memberikan kepuasan terhadap produk akhir dengan tingkat jauh lebih tinggi daripada di Aceh (Barenstein 2006). Memalukan bahwa model-model 'swakarsa pengguna' demikian tidak diterapkan secara luas di Aceh karena sejumlah alasan; pendekatan semacam ini jauh lebih mungkin memberikan kontribusi pada pembangunan tempat tinggal yang jauh lebih cocok secara kultural, dan menciptakan pemantik keterlibatan langsung: penduduk yang secara harfiah membangun kembali tempat tinggal dan komunitas mereka.

¹⁵ Sayang data kami tidak mencapai tingkat nuansa yang dibutuhkan untuk benar-benar menuturkan cerita lengkap yang berkaitan dengan pembangunan rumah warga, karena ada begitu banyak variasi gaya rumah yang dibangun oleh banyak organisasi, maupun batas-batas

Beberapa responden menjelaskan secara rinci tentang pembagian ruang di dalam rumah berdasarkan gender, dan beragam implikasi dari tata ruang perumahan di *gampông-gampông*. Dari hasil wawancara terungkap bahwa jika masjid dan *meunasah* merupakan ruang interaksi dan diskusi kaum laki-laki, maka ruang domestik rumah tangga menjadi sangat penting bagi interaksi dan dialog bagi kaum perempuan. Secara tradisional, areal di bawah rumah panggung Aceh dan di sekitar dapur – jika rumahnya bukan rumah panggung – adalah ruang-ruang kunci bagi kaum perempuan untuk berkumpul dan mendiskusikan isu-isu di komunitas mereka. Ketidadaan ruang-ruang ini, ditambah tata ruang dalam rumah dan tata letak desa yang baru, menyebabkan kaum perempuan di sejumlah desa merasa lebih terkucil. Hal seperti inilah yang berulang-kali kami temukan selama survei, di mana kaum perempuan tersebar di sana-sini, umumnya di lokasi-lokasi sekitar rumah mereka, baik secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Kondisi ini sangat kont ras dibandingkan dengan kerumunan kaum laki-laki di warung-warung kopi.¹⁶

Salah satu desa yang kami kunjungi, *Kampung Jawa*, patut mendapat perhatian khusus dalam pembahasan ini, karena salah satu donor penting penyedia ‘penampungan’ sementara bagi korban Tsunami di sana, Muslim Aid, secara sadar melakukan upaya untuk menawarkan gaya rumah yang sesuai dengan tradisi Aceh. Warga di desa ini bisa memilih antara rumah beton ‘moderen’ yang dibangun sejajar dengan permukaan tanah, atau model rumah panggung yang disebut *rumah Aceh*, gaya rumah tradisional Aceh. Tidak ada konsensus yang jelas perihal gaya rumah, masing-masing memiliki daya tarik sendiri, tapi dari wawancara kami, banyak responden, tanpa memandang gaya mana yang dipilih, merasa senang karena Muslim Aid menawarkan rumah bergaya tradisional – entah mereka ambil atau tidak. Warga memandang hal ini sebagai ungkapan rasa menghargai, dan menganggab hal ini sebagai sebuah kasus nyata untuk proyek rekonstruksi yang peka terhadap keinginan dan kebiasaan budaya setempat. Tetapi, dalam kurun waktu setahun setelah dibangun, hampir semua responden mengungkapkan keluhan bahwa meskipun

bentuk yang didasarkan pada metodologi yang diterapkan. Karena itu kami tidak dapat menyediakan model yang lebih canggih di sini.

¹⁶ Warung kopi memainkan peran sangat penting dalam kehidupan sosial kaum laki-laki di Aceh, dan ini menjadi satu ciri yang kami dapati direkonstruksi dalam bentuk tertentu di semua desa yang kami kunjungi. Ini hanya salah satu dari sejumlah ciri lain dalam lanskap-lanskap Aceh yang terdaftar yang patut mendapat perhatian dalam kajian kami, tapi kami kekurangan ruang di bab ini untuk memaparkan semua unsur dari lingkungan binaa ini.

idinya bagus, namun bahan bangunan yang digunakan bermutu rendah. Mereka khawatir dengan penggunaan asbes,¹⁷ dan orang-orang ‘tidak bisa tidur di malam hari karena bunyi rayap menggerogoti kayu’. Warga semakin frustrasi oleh fakta bahwa LSM ini men-subkontrakkan pekerjaan ke pihak lain, sehingga hasil akhirnya berupa rumah bantuan yang mengecewakan. Memalukan sekali bahwa prakarsa yang awalnya terlihat bagus tersebut menemui kegagalan karena alasan teknis, padahal ini merupakan salah satu dari sedikit kasus yang kami jumpai di Aceh tentang LSM yang secara khusus meniru model rumah tradisional dalam pembangunan rumah-rumah bantuan bagi korban Tsunami.

Secara keseluruhan, pengadaan perumahan bagi korban Tsunami merupakan isu yang menyumbangkan kendala-kendala utama dalam proses pemulihan, termasuk memaksa pengungsi bereaksi terhadap parameter-parameter spasial yang sangat berbeda dan tidak dikenal akrab, yang tidak bersimpati pada kondisi-kondisi yang ada sebelumnya, baik di barak-barak pengungsian sementara maupun di rumah-rumah yang baru dibangun.¹⁸ Sejumlah responden baru saja pulang kembali ke desa mereka setelah menghabiskan waktu hampir dua tahun di fasilitas penampungan sementara yang jauh dari tanah mereka. Penduduk secara terbuka mempertanyakan mengapa mereka dipindahkan dan dipisahkan dari tanah mereka begitu lama untuk menunggu orang lain membersihkan reruntuhan dan membangun rumah buat mereka. Selain itu, sebagian responden menyebutkan bahwa selama dalam masa pengungsian, sisa-sisa komunitas terkadang bertebaran di mana-mana, dan keadaan yang mereka temukan sering tidak cocok dengan kondisi sosial yang mereka kenal akrab.¹⁹ Hal ini bukan hanya menggarisbawahi

¹⁷ Ini salah satu desas-desus yang beredar di seputar desa, tapi kami tidak bisa mengkonfirmasi adanya asbes di rumah-rumah.

¹⁸ Tetapi, ada contoh-contoh di mana penduduk tampak senang dengan rumah ‘baru’ yang sangat berbeda dari rumah lama mereka. Khususnya, banyak warga desa Lampuuk, yang direkonstruksi oleh Bulan Sabit Merah dari Turki, melaporkan bahwa mereka puas dengan rumah ‘modern’ baru mereka. Kepuasan ini mungkin sekali berhubungan dengan bagusnya bangunan rumah-rumah itu dan kelengkapannya, tapi responden juga mencatat bahwa mereka merasa sangat terlibat dalam proses rekonstruksi di desa mereka. Ini mendukung gagasan yang disebutkan di atas bahwa ada perbedaan ketika penduduk merasa berada di balik perubahan yang dilakukan, dan bukan sebagai penerima perubahan yang didesakkan dari luar.

¹⁹ Ini sangat menyuarakan pendapat Gist dan Lubin bahwa “Menyusul bencana berskala besar, orang-orang yang bertanggung-jawab atas upaya relokasi, karena kekurangtahuan atau sekadar cari untung, bisa saja mengabaikan pengelompokan-pengelompokan alami yang secara tradisional ada dalam komunitas-komunitas, dan banyak korban harus mengandalkan hunian sementara yang jarang mencerminkan hubungan-hubungan personal dan pola-pola bertetangga pra-bencana” (Gist dan Lubin 1999, h. 41).

sejumlah isu praktis, tetapi juga membuktikan keterkaitan antara *gampong* dan keinginan, setidaknya pada sebagian orang, untuk kembali secepat mungkin ke keadaan yang telah dikenal akrab.

Permasalahan-permasalahan seputar penyediaan rumah bantuan kepada korban Tsunami telah merembes ke isu-isu terkait mengenai hak atas tanah dan pemberian hak, yang dituturkan responden dengan sejumlah cara. Mereka secara mendetail berbicara tentang percampuran berbagai macam orang di desa-desa yang dibangun kembali, dan kehadiran 'orang luar' yang menempati 'rumah tsunami'.²⁰ Dalam sejumlah kasus, mereka ini merupakan kerabat para korban yang datang untuk mengklaim tanah keluarga, tapi sangat sering terdengar tentang para pekerja Jawa, atau orang-orang yang berasal dari tempat lain di Aceh, yang bermukim di desa-desa yang dibangun kembali, dengan alasan karena lokasi tersebut dekat dengan kesempatan mereka memperoleh pekerjaan.

Terakhir, logika dasar di balik pembangunan hunian berskala besar yang dilakukan oleh sejumlah LSM diabsahkan berdasarkan konsep penguasaan, pengesahan dan kepemilikan tanah yang tidak konsisten dengan praktik-praktik yang ada sebelumnya, di mana kepemilikan tanah dipahami dalam kerangka adat, atau tradisi budaya lokal. Sementara proyek RALAS²¹ telah bekerja secara ekstensif bersama komunitas-komunitas lokal untuk mendamaikan masalah ini melalui program pemetaan komunitas dan pensertifikatan yang sangat teliti, seluruh proses alokasi rumah dipenuhi berbagai kerumitan, dan membuka peluang besar untuk disalahgunakan (D. Fitzpatrick, di volume ini). Hal semacam ini merebak dikarenakan kegagalan LSM dalam melihat isu pengadaan perumahan dalam konteks yang lebih luas tentang tata ruang komunitas dan kepemilikan tanah di Aceh.

Pendapat terakhir yang diungkapkan oleh sebagian responden kami adalah perihal kecemburuan yang merebak antara – dan dalam sejumlah kasus bahkan di dalam – *gampong-gampong*, karena perbedaan alokasi sumber daya pengadaan rumah. Puluhan organisasi asing telah terlibat dalam pembangunan rumah di sepanjang ratusan mil kawasan pesisir, dengan pengawasan dan koordinasi yang sangat terbatas. Beragam cetak-biru, bahan bangunan yang dipakai, dan fasilitas kenyamanan yang tercakup di dalamnya telah menciptakan kesenjangan lanskap, di mana

²⁰ Kami harus mengawali semua wawancara dengan menetapkan apakah calon responden berasal dari *gampong* bersangkutan. Mulanya kami sangat terkejut oleh banyaknya orang yang sebelum tsunami tidak tinggal di wilayah-wilayah tersebut.

²¹ Lihat Fitzpatrick 2008a, 2008b, 2008c, & 2008d untuk informasi lebih detail tentang program RALAS, serta Dunlop, J. di buku ini.

faktor-faktor ketidakteraturan sering menyebabkan wilayah tertentu menerima jenis tunjangan tertentu pula. Kondisi seperti ini menjadi topik bahasan responden di sejumlah desa yang sadar betul bahwa ada desa-desa yang mendapatkan pemberian 'lebih baik', sehingga bisa berpotensi menjadi sumber ketegangan jangka panjang.

Kata-kata penutup

Ketika ada nilai didapat dari mempelajari dampak bencana dan rekonstruksi terhadap 'situs-situs pusaka' yang bermanfaat bagi praktik-praktik pengelolaan pusaka internasional, menjadi sesuatu yang lebih penting untuk memahami konstelasi tempat-tempat sarat makna yang membentuk pusaka kultural vernakular dari komunitas-komunitas dalam konteks rekonstruksi pasca bencana. Situs-situs dan tempat-tempat tersebut merupakan bagian dari tatanan kehidupan sosial sehari-hari, dan unsur-unsur lanskap yang menjadi pedoman masyarakat pada masa-masa trauma dan disorientasi. Sebagaimana diuraikan di atas, masyarakat di Aceh sangat mengenal pasti situs-situs dan tempat-tempat yang mereka anggap penting untuk membangkitkan dan mengontekstualkan respons mereka di tingkat individu dan komunitas, dan memberi mereka akses kepada kehidupan mereka sebelum Tsunami.

Kedua, banyak situs dalam lanskap vernakular secara aktif berperan penting dalam pembuatan fungsi-fungsi sosial sehari-hari yang penting, seperti menyediakan ruang untuk musyawarah komunitas, penyelesaian konflik dan pembuatan keputusan, yang kesemuanya sangat mendasar untuk proses pemulihan. Banyak proses yang dilakukan melalui berbagai diskusi penting perihal masa silam, masa kini dan masa depan masyarakat yang trauma difasilitasi bukan oleh intervensi asing, melainkan oleh akses penduduk terhadap tempat-tempat dan konteks-konteks pokok yang sesuai secara kultural, di mana terjadi beraneka ragam bentuk diskusi. Ini bukan saja melibatkan kepemimpinan komunitas, jaringan-jaringan sosial dan hierarki-hierarki, tapi juga kondisi-kondisi materil di mana komunitas mengetahui bagaimana caranya berinteraksi. Tanpa adanya semua yang disebutkan di atas, partisipasi komunitas yang bermakna dan komprehensif tidaklah mungkin dilakukan.

Menariknya, dengan jelas dapat segera dilihat bahwa dalam pemahaman orang Aceh tentang pusaka budaya vernakular, ada paduan luar-biasa dari unsur kultural, historis dan religius. Hal ini tidak mengherankan jika mengingat tingkat ketaatan religius di Aceh yang menjadi lebih diformalkan oleh penerapan syariah, dan diperkuat oleh

kebangkitan religius sebagai bagian dari keseluruhan respons terhadap trauma (Miller, akan terbit). Bagaimanapun juga, hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam konteks bagaimana memahami situs-situs dan tempat-tempat kultural dan religius berfungsi sebagai gelanggang bagi sederet panjang fungsi sosial yang terentang dari interaksi sehari-hari sampai upacara-upacara khusus. Diskusi kami dengan responden menunjukkan bahwa situs-situs tersebut memainkan peran simultan sebagai pemersatu identitas-identitas religius, dan sebagai ruang-ruang tempat dilaksanakannya diskusi yang diperlukan untuk semua fase pertolongan darurat, rekonstruksi dan pembangunan. Ini sering menjadi isu bagi organisasi-organisasi internasional yang memiliki aturan khusus yang melarang sumbangan untuk bangunan religius, dan/atau staf berisi orang-orang yang kurang memiliki apresiasi nyata terhadap peran agama dan keyakinan dalam komunitas-komunitas.²²

Pengalaman kami di Aceh menunjukkan bahwa sangatlah berharga mempertimbangkan secara hati-hati berbagai kondisi sosial dan kultural yang sebelumnya sudah ada, dan mengapresiasi bahwa itu adalah bagian dari kompleksitas proses-proses penanggulangan penderitaan dan pemulihan di tingkat komunitas. Beramai-ramai 'membangun kembali dengan lebih baik' atas nama industri rekonstruksi dan pembangunan, disertai tingginya tingkat keterputusan antara pemberi dan penerima bantuan dan kekurangtahuan terhadap praktik sosial-budaya di Aceh, telah mengacaukan mekanisme-mekanisme yang penting bagi rehabilitasi sosial yang digerakkan dari dalam, serta penyaluran sumber daya bantuan yang efektif dan berguna. Jelas, ada banyak ruangan yang tersedia bagi agen-agen luar untuk membantu proses pemulihan, tapi sebagaimana yang kami sampaikan dengan penuh semangat, upaya apapun yang menghalangi digunakannya mekanisme-mekanisme laten dalam mengatasi penderitaan, atau terciptanya metode-metode baru oleh komunitas untuk menanggapi keadaan luar-biasa, dapat merugikan dan bertentangan dengan logika dasar di balik intervensi pertolongan darurat dan rekonstruksi. Menjauhi kondisi-kondisi dan praktik-praktik yang secara kultural telah dikenal akrab bukan saja menambah gangguan dan disorientasi, tapi juga menyodorkan hambatan-hambatan serius yang menyulitkan komunitas untuk secara intuitif menemukan jalan pemulihan mereka sendiri. Kami memperingatkan bahwa agenda-agenda eksternal eksplisit yang menentukan pertolongan darurat dan bantuan

²² Ini khas skeptisisme mengenai kepercayaan dan praktik religius dan kultural lokal yang tersebar luas di jajaran pekerja LSM internasional di Aceh, dan situasi-situasi bantuan lainnya.

atau membidik transformasi sosial dapat memperparah disorientasi, dan hilangnya keterlibatan masyarakat dalam fase-fase kunci pemulihan.²³

...ketidakpedulian terhadap kearifan lokal akan mengubur rumah dan impian untuk Aceh yang baru sejak peletakan batu pertama rekonstruksi (YAKKUM Emergency Unit website http://www.yeu.or.id/about_us.php).

Sederhananya, ketika beroperasi di lingkungan asing, mengakrabi dan menghargai kearifan lokal harus menjadi praktik konvensional. Sayangnya, ini bukan menjadi prosedur standar operasi untuk pekerjaan rekonstruksi di Aceh, kecuali hanya sebatas retorika. Di tengah kebutuhan mendesak para birokrat dan agensi-agensi bantuan untuk mencapai angka statistik keberhasilan yang jelas dan nyata untuk dipamerkan di depan konstituen dan pendonor mereka, menenangkan penduduk Aceh, dan memenuhi mandat ‘membangun kembali dengan lebih baik’, ada pengabaian luas dan sistematis terhadap kearifan lokal. Entah karena kekurangtahuan atau arogansi, mayoritas sangat banyak LSM dan organisasi pemerintah secara efektif mengejar rekonstruksi tingkat komunitas dengan perspektif dari-atas-ke-bawah, dan mengizinkan sejumlah besar prosesnya ditentukan oleh kontraktor dan konsultan dari luar. Di samping itu, proses konsultasi komunitas oleh LSM dan agensi pembangunan lainnya selama periode utama penilaian kebutuhan dan perencanaan rekonstruksi, sangat cacat. Penelitian kami menjadikan jelas bahwa proses-proses ditentukan oleh rangkaian infrastruktur kelembagaan fisik maupun aparat sosial yang menciptakan identitas *gampong* dan menyokong wacana komunitas. Tiadanya kedua hal itu di banyak tempat secara efektif banyak melemahkan – atau bahkan melumpuhkan – upaya untuk ‘melibatkan’ jajaran pemimpin dan anggota komunitas lokal dalam perencanaan rekonstruksi. Mewujudkan praktik-praktik ideal rekonstruksi dan pembangunan ‘partisipatoris’ tidak dapat dicapai tanpa memahami lanskap budaya lokal dan mengapresiasi nuansa sosial yang tertanam di dalamnya. Lebih dari segalanya, penting sekali memahami bagaimana merekonstruksi lingkungan lama agar bisa lebih diserasikan dengan meredakan trauma sosial, dan mengizinkan warga di daerah tersebut untuk memiliki kesempatan sebesar-besarnya (walaupun dalam keadaan sangat susah) untuk mengorientasikan kembali diri mereka sendiri dalam lanskap yang porak-poranda.

²³ Ini kritik yang jauh lebih luas tentang proses pertolongan darurat, rekonstruksi dan pembangunan, daripada yang dapat digarap di buku ini. Pembahasan yang lebih komprehensif akan disampaikan dalam sebuah monograf tentang transformasi sosial pascabencana (Daly, akan terbit).

Ucapan terima kasih

Penelitian di bab ini didanai oleh *Asia Research Institute, National University of Singapore*, sebagai partisipasi Daly dalam konferensi di New Delhi yang melandasi buku ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada panitia konferensi yang telah bermurah hati membiayai perjalanan Rahmayati dari Aceh ke India. Konferensi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berinteraksi dengan para sarjana yang bekerja di luar Indonesia, dan kami berterima kasih kepada panitia dan rekan-rekan peserta. Kami haturkan terima kasih kepada anggota *Aceh Heritage Community* yang membantu survei lapangan, Dina Delias yang membantu dengan tinjauan pustaka, dan Dr Michael Feener yang telah membaca draf awal bab ini.